

**PROSEDUR PELAKSANAAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK  
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BHAKTI SUMEKAR  
CABANG KALIANGET**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Diploma 3  
Program Studi Perbankan dan Keuangan



Oleh :

**IEINTIYA AGUSTINA**  
**NIM : 2016110142**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS**

**SURABAYA**

**2019**

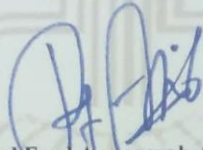
## PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ifintiya Agustina  
Tempat, Tanggal Lahir : Sumenep, 20 Agustus 1998  
N.I.M : 2016110142  
Program Studi : Perbankan dan Keuangan  
Program Pendidikan : Diploma 3  
Judul : Prosedur Pelaksanaan Deposito Mudharabah pada Bank  
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang  
Kalianget

Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing,

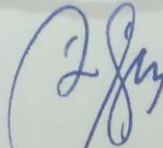
Tanggal : 27-08-2019



(Rohmad Fuad Armansyah, SE., M.Si)  
NIDN. 0708118405

Ketua Program Studi Diploma 3

Tanggal : 27-08-2019



(Dr. Kautsar R. Salman, SE., MSA., Ak.)

# PROCEDURE FOR IMPLEMENTING MUDHARABAH DEPOSITS IN THE BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BHAKTI SUMEKAR KALIANGET BRANCH

Ifintiya Agustina

2016110142

e-mail : [ifintiyaagustina20@gmail.com](mailto:ifintiyaagustina20@gmail.com)

## ABSTRACT

The Indonesian Ulema Council built a working group to run Islamic Banks in Indonesia. As a result of the work of the Banking Team of the Majelis Ulama Indonesia (MUI) it was the establishment of the first Islamic bank in Indonesia, PT Bank Muamalat Indonesia. At the end of 2013, banking regulation and supervision functions moved from Bank Indonesia (BI) to the Otoritas Jasa Keuangan (OJK). One of the principles in the Islamic banking system is profit sharing (*mudharabah*) which is an alternative banking system that is mutually beneficial for customers and banks. By providing a variety of products and services, Islamic banking is an alternative banking system that is in demand by all segments of society. The purpose of writing is to understand the procedures for implementing mudharabah deposits at the Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kalianget branch. The researcher used the descriptive method. The results of the research obtained, mudharabah deposits are one of the investment products for a period of time using the principle of profit sharing. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Kalianget branch in the process of raising funds, especially mudharabah deposits using *mudharabah mutlaqah* contracts. *Mudharabah mutlaqah* is *shahibul maal* (fund owner) does not give a limit to *mudharib* (fund manager) has the freedom to invest funds in various business sectors which are expected to benefit. Extension of mudharabah deposits is carried out by the ARO ( *Automatic Roll Over* ) method . And profit sharing will be credited to the customer's savings account.

Keywords: mudharabah deposits, *mudharabah mutlaqah*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Bank sebagai lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana dari masyarakat yang nantinya akan disalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit. Untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang berubah cepat, tantangan yang dinamis, semakin kompleks, serta terintegrasi dengan perekonomian internasional, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang perbankan. Deregulasi perbankan yang dimulai sejak tahun 1983. Pada tahun 1983 pemerintah akan merencanakan sistem bagi hasil untuk perkreditan yang mana hal

tersebut merupakan salah satu konsep perbankan syariah.

Pada tahun 1990, Majelis Ulama Indonesia membangun suatu kelompok kerja untuk menjalankan Bank Islam di Indonesia. Sebagai hasil kerja Tim Perbankan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut adalah berdirinya bank syariah pertama di Indonesia yaitu PT Bank Muamalat Indonesia. Sistem perbankan syariah di Indonesia menjadi salah satu sistem terbaik dan terlengkap yang diakui secara internasional. Pada akhir 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia (BI) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Salah satu prinsip yang ada dalam sistem perbankan syariah yaitu bagi hasil (*mudharabah*) yang merupakan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi nasabah maupun bank. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget dipilih sebagai tempat penelitian tugas akhir karena merupakan tempat kegiatan magang penulis. Selain itu, penulis juga tertarik untuk meneliti salah satu produk yang ditawarkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget kepada nasabah yaitu deposito *mudharabah*. Deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar berbeda dengan yang dimiliki oleh Bank Islam lainnya. Penulis juga ingin mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan dari deposito *mudharabah* yang dilakukan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar. Dengan adanya uraian di atas penulis mengangkat topik dan membahas mengenai “PROSEDUR PELAKSANAAN DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH (BPRS) BHAKTI SUMEKAR CABANG KALIANGET”.

#### **Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang dimaksud dengan produk deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar cabang Kalianget ?
2. Bagaimana prosedur pembukaan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget ?
3. Bagaimana prosedur pencairan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget ?
4. Bagaimana prosedur perpanjangan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget ?

#### **Tujuan Penelitian**

Berikut ini merupakan beberapa tujuan penulis melakukan penelitian ini, di antaranya :

1. Untuk mengetahui produk deposito *mudharabah* yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget.
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembukaan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget.
3. Untuk mengetahui prosedur pencairan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget.
4. Untuk mengetahui prosedur perpanjangan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget.

#### **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain :

##### **Bagi penulis**

Menambah wawasan penulis mengenai perbankan syariah, salah satu produk perbankan syariah yaitu deposito *mudharabah*. Penulis dapat mengetahui syarat-syarat dan ketentuan untuk membuka deposito *mudharabah*, prosedur pelaksanaan deposito *mudharabah*, perhitungan nisbah bagi hasil, hambatan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget.

##### **Bagi bank**

Dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk lebih baik lagi dalam pelaksanaan pembukaan maupun penutupan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget.

##### **Bagi pembaca**

Dapat dijadikan tambahan pengetahuan maupun referensi mengenai produk deposito *mudharabah*, prosedur



pelaksanaan deposito *mudharabah*, serta cara meminimalisir hambatan-hambatan yang terjadi pada saat proses pelaksanaan pembukaan maupun penutupan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget.

### Bagi STIE Perbanas Surabaya

Menambah referensi bacaan bagi mahasiswa STIE Perbanas mengenai Perbankan Syariah, produk deposito *mudharabah*, dan prosedur pelaksanaan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### Pengertian Perbankan Syariah

Dalam konteks perbankan syariah, tidak akan ditemukan lafaz atau teks di Al-Qur'an dan hadits tentang perbankan, namun ditemui perintah tentang melakukan bertransaksi, yaitu mengharamkan riba, tidak boleh berlaku zalim, tidak mengenal untung-untungan dan transaksi yang bathil. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 butir 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Dari definisi bank di atas bank memiliki fungsi yang luas yaitu tempat penghimpun dana dengan beberapa sistem atau jasa baik perseorangan ataupun badan usaha dan tempat menyalurkan dana melalui kredit, lembaga pemerintahan dan swasta.

Pada konsep Islam istilah bank secara literatur tidak dikenal, namun secara fungsional praktiknya telah dimulai sejak zaman Rasulullah SAW. Bank syariah memiliki prinsip berbeda dengan bank konvensional, beroperasi atas dasar ajaran (syariah) Islam. Istilah bank tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti manajemen,

fungsi, struktur, kewajiban dan hak, maka semua itu jelas seperti zakat, *ghanimah* (rampasan perang), *shadaqah*, *dayn* (utang dagang), *ba'i* (jual-beli), *mal* (harta) yang memiliki konotasi fungsi yang dilaksanakan dalam kegiatan ekonomi dalam peran tertentu.

Bank yang berdasar pada prinsip syariah, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.

### Perbankan Syariah dan Perbankan Konvensional

Bank syariah dan bank konvensional memiliki beberapa persamaan terutama dalam hal mekanisme transfer, syarat-syarat umum pembukaan simpanan, teknis penerimaan uang. Namun, tidak sedikit pula perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional yang akan diuraikan dalam bentuk tabel.

**Tabel 2.1**  
**Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional**

| No. | Aspek                                  | Bank Syariah   | Bank Konvensional  |
|-----|--|--|--|
| 1.  | Akad dan aspek legalitas               | a. Hukum positif dan syariah<br>b. Lembaga Peradilan meliputi Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI)                           | a. Hukum positif<br>b. Lembaga peradilan adalah pengadilan tinggi  |
| 2.  | Kegiatan operasional                   | Bagi hasil, jual beli, sewa  | Bunga ( <i>no risk</i> )   |
| 3.  | Struktur organisasi                    | Direksi dan Komisaris Dewan Pengawas Syariah   | Direksi dan Komisaris  |
| 4.  | Orientasi dan bisnis                   | a. Orientasi adalah <i>profit</i> dan <i>falah</i><br>b. Jenis bisnis adalah halal<br>c. Sektor riil dengan sektor moneter terkait | a. Orientasi adalah <i>profit</i><br>b. Jenis bisnis adalah halal dan haram<br>c. Sektor moneter dengan sektor riil terpisah |
| 5.  | Lingkungan kerja dan budaya perusahaan | Syariah, Etika (Akhlak), Siddiq, Amanah, Tabligh, dan Fathonah   | Etika Umum   |

Sumber : Salman, Kautsar Riza (2017)

### Akad Mudharabah

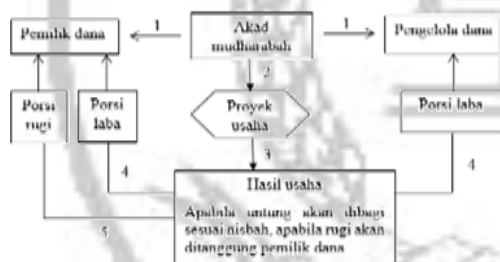
Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yang artinya adalah bepergian untuk urusan dagang. Secara teknis mudharabah merupakan akad kerja sama yang dilakukan antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan suatu usaha, di mana laba di bagi atas dasar nisbah bagi hasil yang telah disepakati kedua belah pihak.

Mudharabah merupakan akad kerja sama antara dua orang. Dalam buku Bank

dan Lembaga Keuangan Lainnya, Kasmir (2014) mengemukakan :

“*Al-Mudharabah* merupakan akad kerja sama antara dua belah pihak, di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak lain menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi, maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola. Apabila kerugian diakibatkan kelalaian pengelola, maka si pengelolah yang bertanggung jawab”.

*Al-Mudharabah* dalam dunia perbankan biasanya diaplikasikan pada produk pendanaan atau pembiayaan misalnya, pembiayaan modal kerja. Dana yang digunakan untuk kegiatan *mudharabah* diambil dari simpanan tabungan berjangka seperti tabungan haji atau tabungan kurban. Dana juga dapat dilakukan dari deposito yang dititipkan nasabah untuk kegiatan tertentu. Berikut adalah skema dari akad *mudharabah* :



Sumber : Salman, Kutsar Riza (2017)

**Gambar 2.1**

### Skema Mudharabah

Keterangan :

1. Pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) melakukan ijab kabul akad *mudharabah*.
2. Proyek usaha disesuaikan dengan akad *mudharabah* yang dikelola oleh pengelola dana (*mudharib*).
3. Proyek usaha akan menghasilkan laba atau rugi.
4. Jika proyek usaha menghasilkan laba, maka nisbah akan diberikan kepada pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) sesuai dengan porsi laba yang telah disepakati pada saat akad *mudharabah*.
5. Jika proyek usaha mengalami kerugian, maka pemilik dana (*shahibul maal*) yang akan menanggung kerugian sebesar porsi rugi pada saat akad *mudharabah*.

### Rukun dan Ketentuan Mudharabah

Ada empat rukun dalam akad *mudharabah*, yaitu :

1. Pelaku, dalam akad *mudharabah* harus terdapat minimal dua pelaku yang terdiri atas pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*).
2. Objek *mudharabah* yang berupa modal dan kerja.
3. Ijab kabul, adanya persetujuan dari kedua belah pihak yang merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Kedua belah pihak saling sepakat dan rela dalam mengikat diri pada akad *mudharabah* (Karim, 2017).
4. Nisbah keuntungan, merupakan imbalan yang akan diterima oleh kedua belah pihak yang terikat dalam akad *mudharabah*. Nisbah ini yang nantinya akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak.

Adapun ketentuan-ketentuan syariah untuk masing-masing rukun adalah sebagai berikut :

1. Pelaku, ketentuan dari pelaku antara lain :
  - a. Harus cakap hukum dan sudah balig.
  - b. Pelaku dalam akad *mudharabah* dapat dilakukan dengan sesama atau dengan non muslim.
  - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur atas pengelolaan usaha namun ia boleh mengawasi.
2. Objek *mudharabah* (modal dan kerja), berikut adalah ketentuannya :
  - a. Modal
 

Beberapa penjelasan yang terkait dengan modal, antara lain :

- 1) Modal yang diserahkan dapat berupa uang ataupun aset lain dan harus jelas jenis dan jumlahnya.
  - 2) Modal diberikan secara tunai. Modal harus diketahui jumlah dengan jelas sehingga dapat dibedakan dari keuntungannya.
  - 3) Pengelola dana (*mudharib*) tidak diperkenankan untuk memudharabahkan modal mudharabah, kecuali mendapat izin dari pemilik dana.
  - 4) Pengelola dana tidak diperkenankan meminjamkan modal kepada orang lain, apabila terjadi akan dianggap suatu pelanggaran kecuali telah mendapat izin dari pemilik dana.
  - 5) Pengelola dana mempunyai kebebasan dalam mengatur modal menurut perkiraan dan kebijaksannya sendiri.
- b. Kerja
- Berikut adalah penjelasan yang terkait dengan kerja :
- 1) Bentuk kontribusi pengelola dana yang berupa keterampilan, keahlian, *management skill*, *selling skill*, dan lain-lain.
  - 2) Pengelola dana harus menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah.
  - 3) Pengelola dana harus memetahui semua peraturan yang telah tercantum dalam kontrak.
3. Ijab kabul  
Merupakan suatu ekspresi atau pernyataan saling rela di antara pihak-pihak pelaku akad yang dilakukan secara tertulis, verbal, melalui korespondensi ataupun menggunakan cara komunikasi modern.
  4. Nisbah keuntungan  
Berikut ini beberapa penjelasan yang terkait dengan nisbah keuntungan :

- a. Nisbah merupakan besaran yang digunakan untuk menentukan besarnya pembagian keuntungan. Nisbah keuntungan dinyatakan dalam bentuk prosentase, tidak dalam bentuk nominal. Berubahan nisbah harus didasari dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak.

Pemilik dana tidak diperbolehkan meminta pembagian keuntungan dengan menyebut nominal karena dapat menimbulkan riba.

#### **Jenis-Jenis Mudharabah**

Terdapat tiga jenis mudharabah apabila dilihat dari sisi bank sebagai *mudharib* (pengelola dana) yang telah diatur dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, berikut adalah uraiannya (Salman, 2017) :

##### **1. Mudharabah muthlaqah**

Merupakan jenis mudharabah di mana *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan kebebasan kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam pengelolaan investasinya dan mudharabah jenis ini juga disebut investasi tidak terikat, karena tidak ditentukan masa berlakunya, dan di daerah mana usaha akan dilakukan. (Salman, 2017).

##### **2. Mudharabah muqayyadah**

Merupakan jenis mudharabah di mana *shahibul maal* (pemilik dana) memberikan batasan kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam pengelolaan dana investasinya seperti lokasi, cara menginvestasikan, dan objek investasi atau sektor usaha. (Salman, 2017).

##### **3. Mudharabah musytarakah**

Mudharabah jenis ini merupakan mudharabah di mana *mudharib* (pengelola dana) menyertakan modal dalam kerja sama investasi. Pada awal kerja sama telah disepakati akad mudharabah di mana 100% modal berasal dari *shahibul maal* (pemilik dana), setelah berjalannya proses operasi usaha dengan adanya berbagai pertimbangan dan kesepakatan dengan



pemilik dana sehingga *mudharib* (pengelola dana) juga ikut menanamkan modal dalam usaha tersebut (Salman, 2017).

### **Deposito Syariah**

Selain tabungan dan giro, produk perbankan syariah lainnya yang termasuk dalam produk penghimpun dana adalah deposito. Adapun yang dimaksud dengan deposito syariah menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan dengan prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa deposito yang dibenarkan adalah deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) sedangkan nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). Dalam kapasitasnya, pengelola dana (*mudharib*) dapat melakukan berbagai macam usaha namun harus sesuai dengan prinsip syariah dan pengembangannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga (Karim, 2017).

### **METODE PENELITIAN**

#### **Desain Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dalam penelitiannya. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang luas untuk mengungkapkan ataupun menjelaskan secara spesifik mengenai berbagai fenomena alam dan sosial dalam kehidupan masyarakat yang menyebabkan seorang peneliti harus terjun ke lapangan dan memiliki komitmen. Peneliti menggambarkan suatu penelitiannya sesuai dengan apa yang dibicarakan, dilihat, dan dilakukan. Untuk itu tujuan dari penelitian deskriptif adalah mampu menjawab permasalahan dari perumusan masalah yang ada.

Penelitian dengan bentuk deskriptif dipilih untuk menjelaskan mengenai prosedur pelaksanaan mulai dari pembukaan sampai pencairan deposito

*mudharabah* yang ada di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget. Peneliti mengadakan wawancara (*interview*) dengan petugas bank, dokumentasi, studi pustaka, dan observasi untuk mengamati secara langsung untuk membuktikan kebenaran dari hasil wawancara. Sebagai suatu pembuktian, penelitian akan dilengkapi dengan pertanyaan dan jawaban pada saat proses wawancara dengan petugas bank mengenai prosedur pelaksanaan deposito *mudharabah*.

#### **Batasan Penelitian**

Batasan penelitian digunakan untuk lebih memfokuskan hasil penelitian. Batasan dalam penelitian ini antara lain :

1. Pemahaman mengenai produk deposito *mudharabah* yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar cabang Kalianget yang mencakup keunggulan yang ditawarkan dari produk deposito *mudharabah*.
2. Prosedur pembukaan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar cabang Kalianget yang di dalamnya meliputi persyaratan dan ketentuan pembukaan deposito *mudharabah* dan pembagian nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank pengelola.
3. Prosedur pencairan dari deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar cabang Kalianget.
4. Prosedur perpanjangan deposito *mudharabah* pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar cabang Kalianget.

#### **Data dan Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama dan diolah langsung oleh peneliti. Berikut merupakan beberapa metode pengumpulan data yang dipakai pada penelitian Tugas Akhir :



1. Wawancara  
Yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dan bertatap muka dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang sesuai dengan topik pembahasan antara peneliti dengan narasumber yang bertujuan untuk mendapatkan informasi secara lengkap dan jelas. Peneliti akan melakukan wawancara bersama dengan dua narasumber, narasumber pertama yaitu Ibu Heni Devita Zais selaku pimpinan dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget yang dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019. Hasil dari penelitian yaitu mengenai perhitungan dan pembagian nisbah bagi hasil deposito mudharabah yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar. Untuk penjelesan yang lebih spesifik beliau menyerahkan kepada Bapak Rory Eka Dharma Putera selaku admin dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget.
2. Dokumentasi  
Merupakan teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersimpan baik berupa catatan, surat kabar, dan lain-lain. Dokumentasi dilakukan pada tanggal 11 Juni 2019, dokumen yang peneliti peroleh antara lain tabel perhitungan Hi-1000, formulir pembukaan rekening deposito mudharabah, formulir registrasi nasabah perorangan, formulir registrasi badan usaha, surat permohonan pencairan deposito mudharabah, dan bilyet deposito mudharabah.
3. Observasi  
Merupakan teknik pengumpulan data dengan cara terjun langsung ke lapangan dan mengamati objek secara langsung. Untuk mengetahui secara langsung alur dari prosedur dan proses pelaksanaan deposito mudharabah mulai dari pembukaan sampai dengan pencairan, peneliti pembuka rekening

deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget.

4. Studi pustaka  
Teknik pengumpulan data dengan cara membaca referensi yang ada dan sesuai dengan topik pembahasan, baik berupa buku, jurnal ataupun Tugas Akhir terdahulu.

### **Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data secara deskriptif. Teknik analisis deskriptif merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan data-data yang telah diperoleh pada saat pengumpulan data.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Gambaran Subyek Penelitian**

Pada sub bab ini akan dijelaskan mengenai sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, *job description*, dan profil usaha dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar memiliki kantor pusat yang berada di Kabupaten Sumenep, tiga kantor kas, dan 26 kantor cabang yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sumenep baik kecamatan daratan maupun kepulauan. Penelitian ini dilakukan di salah satu kantor cabang yaitu kantor cabang Kalianget dan berdasarkan hasil wawancara untuk setiap kantor cabang tidak memiliki *Customer Service* (CS) kecuali kantor pusat dan kantor cabang yang berada di kepulauan. Sehingga untuk semua hal yang berhubungan dengan *Customer Service* (CS) akan dilimpahkan pada bagian admin. Berikut ini penjelasan lebih rinci mengenai sejarah singkat perusahaan, visi misi perusahaan, struktur organisasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) cabang Kalianget, *job description* dari bagian-bagian yang telah disebutkan pada struktur organisasi, dan profil usaha dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget :

## Sejarah singkat perusahaan

Sejak dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Peraturan Pemerintah daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Otonom, maka dengan ini kewenangan otonom diserahkan kepada daerah. Kewenangan yang dimaksud mencaup segala penanganan urusan rumah tangga daerah serta meningkatkan dan mendayagunakan potensi ekonomi.

Pemerintah Kabupaten Sumenep sangat memerlukan peran lembaga keuangan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Lembaga keuangan tersebut diharapkan dapat mendayagunakan dan meningkatkan perekonomian daerah yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep secara merata. Melihat dari kondisi daerah Sumenep, Pemerintah Kabupaten Sumenep akhirnya memilih lembaga keuangan berbentuk BPR Syariah.

Pemerintah Kabupaten Sumenep memilih untuk melakukan akuisisi terhadap salah satu bank yang berdomisili di Sidoarjo yaitu PT BPR Dana Merapi yang nantinya akan direlokasi ke Kabupaten Sumenep. Pada saat melakukan akuisisi terhadap PT BPR Dana Merapi, Pemerintah Kabupaten Sumenep membuat suatu surat perjanjian kerja sama dalam pendirian BPR Syariah di Kabupaten Sumenep dengan Nomor Surat 910/608b/435.304/200-

1011/BMI/PKS/XII/2001. Surat tersebut ditandatangani oleh PT Bank Syariah Muamalat Indonesia dan Bupati Sumenep pada tanggal 27 Desember 2001. Selain membuat surat perjanjian kerja sama, Pemerintah Kabupaten Sumenep juga membuat *Memorandum of Understanding* (MOU) yang berisi pihak PT Bank Muamalat sebagai pelaksana dalam proses pengalihan BPR dan juga bertanggung jawab atas pemberian konsultasi mengenai rekrutmen, perjanjian, pelatihan dan pembinaan.

(<http://bhaktisumekar.co.id>, diunduh pada tanggal 28 Juni 2018).

## Visi dan Misi

Visi dan misi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar telah menjadi ketetapan sebagai landasan untuk seluruh *stakeholders* untuk mencapai satu tujuan bersama. Berikut ini merupakan visi dan misi dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Bhakti Sumekar :

### VISI

“Terwujudnya masyarakat yang makin sejahtera dengan diadasi nilai-nilai agama dan budaya”

### MISI

1. Intermediasi antar pelaku ekonomi yang berlebih dengan yang kurang dalam permodalan berdasar syariah.
2. Membantu melaksanakan pemberdayaan pengusaha ekonomi kecil dan menengah.
3. Mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

## Hasil dan Pembahasan

### Produk deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar

Menurut Bapak Rory selaku admin Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget, pengertian deposito mudharabah adalah investasi dalam bentuk simpanan berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan yang menggunakan prinsip bagi hasil yang telah disepakati bersama. Deposito mudharabah menggunakan akad *mudharabah mutlaqah*, yang artinya *shahibul maal* (pemilik dana) tidak memberikan batasan kepada *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola dana investasi dan menyalurkan ke berbagai sektor usaha yang nantinya akan mendapat keuntungan. Deposita tidak hanya mendapat nisbah deposito mudharabah saja. Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget juga menawarkan beberapa keuntungan yang nantinya akan diperoleh oleh deposita. Berikut adalah

keuntungan yang dapat diperoleh jika menjadi nasabah deposito mudharabah :

- 1) Bagi hasil yang diberikan lebih kompetitif sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara *shahibul maal* (pemilik dana) dengan *mudharib* (pengelola dana).
- 2) Deposito mudharabah juga dapat digunakan sebagai jaminan. Maksudnya, apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan misal berupa gadai emas untuk uang angsuran dan pemeliharaan dapat diambilkan dari nisbah keuntungan yang diperoleh setiap bulan.
- 3) Deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar dapat diperpanjang secara otomatis sehingga nasabah tidak perlu memperpanjang jangka waktu deposito ketika jatuh tempo dengan syarat memilih option diperpanjang otomatis pada saat mengisi formulir pembukaan deposito mudharabah.
- 4) Deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
- 5) Bagi hasil (nisbah) dapat diambil secara tunai atau langsung dikreditkan ke rekening tabungan nasabah, sesuai dengan permintaan nasabah.

Depositor juga akan mendapat keistimewaan dari produk deposito yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget yaitu tidak dikenakan denda (*penalty*) jika dana investasi akan ditarik sebelum jatuh tempo. Namun sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar, depositor tidak menerima bagi hasil (nisbah) pada bulan itu dan seterusnya karena pembagian nisbah deposito mudharabah akan dibayarkan setiap bulan per tanggal pembuatan deposito. Dan secara otomatis, jika dana investasi ditarik maka deposito mudharabah akan ditutup dan berakhir.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget memiliki empat jenis deposito mudharabah jika dilihat dari jangka waktunya. Keempat jenis deposito mudharabah memiliki porsi nisbah yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasannya :

- 1) Deposito mudharabah dengan jangka waktu 1 bulan dengan porsi pembagian nisbah untuk nasabah dan bank adalah 53% : 47%.
- 2) Deposito mudharabah dengan jangka waktu 3 bulan dengan porsi pembagian nisbah untuk nasabah dan bank adalah 56% : 44%.
- 3) Deposito mudharabah dengan jangka waktu 6 bulan dengan porsi pembagian nisbah untuk nasabah dan bank adalah 58% : 42%.
- 4) Deposito mudharabah dengan jangka waktu 12 bulan dengan porsi pembagian nisbah untuk nasabah dan bank adalah 60% : 40%.

Pembagian nisbah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar selalu berubah setiap bulan tergantung pada keuntungan yang diperoleh bank dan nisbah akan dihitung berdasarkan Hi-1.000. Hi-1.000 merupakan keuntungan yang didapat oleh bank dari per 1.000 investasi.

#### Contoh perhitungan :

Bapak Romy akan membuka deposito mudharabah dengan dana sebesar Rp 25.000.000,- pada tanggal 24 Juni 2019 dengan jangka waktu 12 bulan. Besar nisbah yang diperoleh Bank dan nasabah adalah 40% : 60%. Maka bagi hasil yang diterima Bapak Romy adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Daftar Hi 1000**

| Jangka waktu          | Hi – 1000 | Nisbah |
|-----------------------|-----------|--------|
| Jangka waktu 1 bulan  | 10.98     | 53%    |
| Jangka waktu 3 bulan  | 10.98     | 56%    |
| Jangka waktu 6 bulan  | 10.98     | 58%    |
| Jangka waktu 12 bulan | 10.98     | 60%    |

Sumber : hasil dokumentasi (data diolah)



### Perhitungannya :

$$\text{Bagi hasil} = \frac{\text{jumlah dana investasi}}{1000} \times \text{Hi} \times \text{nisbah}$$

Dengan ketentuan : > Rp 7.500.000,- nisbah dikenai pajak 20%

$$\begin{aligned}\text{Bagi hasil} &= \frac{\text{Rp } 25.000.000}{1000} \times 10.98 \times 60 \% \\ &= \text{Rp } 164.700,-\end{aligned}$$

Karena deposito Bapak Romy melebihi Rp 7.500.000,- maka bagi hasil akan dikurangi pajak sebesar 20%

$$\begin{aligned}\text{Pajak} &= 20\% \times \text{Rp } 164.700,- \\ &= \text{Rp } 32.940,-\end{aligned}$$

Jadi, bagi hasil yang diperoleh Bapak Romy pada bulan 24 Juli 2019 sebesar Rp 131.760,-

### Jurnal akuntansi :

- 1) Pada saat penempatan deposito :
  - D. Kas teller Rp 25.000.000
  - K. Deposito Mudharabah an Bapak Romy Rp 25.000.000
- 2) Bagi hasil deposito :
  - D. Beban bagi hasil Rp 164.700
  - K. Pajak 20% Rp 32.940
  - K. Tabungan wadi'ah an Bapak Romy Rp 131.760
- 3) Pencairan deposito :
  - D. Deposito Mudharabah an Bapak Romy Rp 25.000.000
  - K. Tabungan wadi'ah an Bapak Romy Rp 25.000.000

### Prosedur pembukaan deposito mudharabah

Berikut ini adalah alur dari pembukaan deposito yang akan diuraikan dalam bentuk gambar :



Sumber : hasil wawancara (data diolah)

**Gambar 4.4**

### Alur Pembukaan Deposito Mudharabah

Penjelasan :

- 1) Nasabah datang ke Bank, kemudian akan ditanyakan terlebih dahulu oleh satpam mengenai tujuannya. Satpam akan meminta nasabah untuk mengambil nomor antrean dan menunggu sampai nomor tersebut dipanggil.
  - 2) Setelah nomor antrean nasabah dipanggil, nasabah menemui bagian admin dan kemudian menyampaikan bahwa ingin membuka deposito mudharabah. Admin meminta nasabah untuk memenuhi persyaratan dan ketentuan deposito. Berikut adalah syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang akan membuka deposito mudharabah :
    - a. Membawa *fotocopy* identitas diri, seperti KTP, SIM, dan lain-lain.
    - b. Mengisi formulir registrasi nasabah berorangan.
    - c. Mengisi formulir pembukaan rekening deposito mudharabah.
    - d. Materai Rp 6.000.
    - e. Nilai minimal deposito mudharabah sebesar Rp 1.000.000,-.
    - f. Jangka waktu investasi 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan.
    - g. Nasabah harus memiliki rekening tabungan terlebih dahulu. Karena nisbah akan langsung dikreditkan ke rekening nasabah setiap bulan per tanggal buka deposito mudharabah.
    - h. Deposito tidak dapat dipindahkan tangankan kecuali ada suatu hal yang mendesak dan harus disertai surat keterangan ahli waris.
- Apabila nasabah yang mengajukan sebagai badan usaha, ada beberapa persyaratan dan ketentuan tambahan yang harus dilengkapi, antara lain :
- a. *Fotocopy* akta pendirian.
  - b. *Fotocopy* anggaran dasar beserta perubahan.
  - c. *Fotocopy* Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  - d. *Fotocopy* Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- 3) Setelah nasabah melengkapi persyaratan dan mengisi formulir, admin akan memeriksa kembali kelengkapan dan

isian dari formulir pembukaan tersebut. Setelah isian dari formulir benar-benar sama dengan yang tertera pada identitas, admin akan menginput data nasabah pada komputer. Admin akan meminta nasabah untuk menyetorkan uang yang akan diinvestasikan kepada teller

- 4) Setelah itu admin akan memproses pembuatan bilyet deposito mudharabah. Sebelum bilyet deposito mudharabah diberikan kepada deposan, admin meminta validasi kepada kepala cabang.
- 5) Setelah bilyet deposito divalidasi oleh kepala cabang, maka bilyet deposito akan diserahkan kepada nasabah untuk menjadi bukti bahwa nasabah telah melakukan investasi.

### **Prosedur pencairan deposito mudharabah**

Berikut ini merupakan alur dari pencairan deposito mudharabah :



Sumber : hasil wawancara (data diolah)

**Gambar 4.5**

#### **Alur Pencairan Deposito Mudharabah**

Penjelasan :

- 1) Nasabah datang ke Bank, akan ditanyakan terlebih dahulu oleh satpam mengenai tujuannya. Kemudian satpam akan meminta nasabah untuk mengambil nomor antrean dan menunggu sesuai dengan nomor yang tertera.
- 2) Setelah nomor antrean dipanggil, nasabah menuju meja admin dan menyampaikan bahwa ingin melakukan pencairan deposito mudharabah. Kemudian, admin akan menjelaskan persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi terlebih dahulu oleh nasabah. Berikut adalah beberapa persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yaitu :

- a. Harus nasabah pemilik rekening deposito mudharabah, tidak diperkenankan untuk diwakilkan kepada orang lain kecuali suatu hal yang mendesak dengan syarat membawa surat keterangan ahli waris.
  - b. Membawa bilyet deposito mudharabah.
  - c. Mengisi surat permohonan pencairan deposito.
  - d. Harus ditandatangani oleh nasabah yang bersangkutan pada bilyet deposito mudharabah.
  - e. Mengisi surat permohonan pencairan deposito mudharabah.
- 3) Setelah nasabah mengisi surat permohonan pencairan, kemudian admin akan meminta persetujuan dari kepala cabang. Setelah disetujui oleh kepala cabang, admin akan memproses pencairan deposito. Bilyet deposito akan dikembalikan ke Bank untuk dijadikan arsip. Pada bilyet deposito mudharabah yang akan dicairkan dananya, nasabah wajib membubuhkan dua tandatangan pada bilyet deposito.
  - 4) Nasabah akan diarahkan ke teller untuk melakukan transaksi tarik tunai atau pemindah bukuan dari rekening deposito ke tabungan nasabah sesuai dengan permintaan nasabah.

### **Prosedur perpanjangan deposito mudharabah**

Perpanjangan deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget dapat dilakukan secara otomatis, apabila pada saat pengisian form pembukaan deposito mudharabah nasabah memilih opsi ARO (*Automatic Roll Over*). ARO (*Automatic Roll Over*) merupakan suatu fasilitas untuk memperpanjang deposito secara otomatis, jadi bank secara otomatis akan menginvestasikan kembali dana deposito beserta bagi hasil ketika deposito mudharabah jatuh tempo. Namun, apabila nasabah tidak memilih opsi tersebut maka dana investasi akan langsung dikreditkan ke

rekening tabungan nasabah pada saat jatuh tempo dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget deposito tersebut secara otomatis akan ditutup. Jika nasabah akan memperpanjang, maka harus kembali ke prosedur awal pembukaan, seperti pengisian formulir pembukaan deposito mudharabah, pengisian data perorangan, menyerahkan *fotocopy* identitas diri, dan lain-lain.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan dari deposito mudharabah mulai dari pembukaan, pembagian nisbah, dan pencairan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget. Berikut simpulan yang didapat dari pembahasan pada bab sebelumnya :

1. Deposito mudharabah merupakan salah satu produk yang ada pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar dalam bentuk investasi berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan dengan minimal dana Rp 1.000.000,- yang menggunakan prinsip bagi hasil dan akad *mudharabah mutlaqah*. Dana investasi pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget sudah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Bagi hasil deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar Cabang Kalianget menyesuaikan dengan hasil keuntungan yang diperoleh pada bulan tersebut dan perhitungannya menggunakan Hi-1000.
2. Proses pembukaan deposito mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget terbilang sangat mudah. Syarat awal nasabah harus memiliki rekening tabungan terlebih dahulu,

kemudian mengisi formulir pembukaan deposito mudharabah, menyerahkan foto copy identitas diri, menyetorkan dana yang akan diinvestasi.

3. Untuk proses pencairan deposito mudharabah, syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu harus nasabah yang bersangkutan, membawa bilyet deposito, dan menandatangani bilyet deposito mudharabah.
4. Proses perpanjangan deposito mudharabah dapat dilakukan secara otomatis menggunakan metode ARO (*Automatic Roll Over*), dengan cara memilih kolom diperpanjang otomatis pada saat pengisian formulir pembukaan. Apabila deposito mudharabah tidak diperpanjang secara otomatis, maka dana investasi akan dikreditkan ke rekening tabungan nasabah dan secara otomatis deposito mudharabah akan ditutup.

### **Saran**

Saran dari peneliti ditujukan untuk penelitian selanjutnya agar lebih baik lagi dan dapat dijadikan bahan pertimbangan, berikut uraiannya :

1. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian di perusahaan atau di Bank yang sama, sebaiknya memilih topik pembahasan yang berbeda. Karena pada Bank Syariah terdapat banyak akad syariah yang dapat dijadikan topik pembahasan untuk diangkat menjadi judul Tugas Akhir.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian dengan topik pembahasan yang sama, sebaiknya dilakukan pada perusahaan atau bank yang berbeda. Karena syarat dan ketentuan antar bank bisa saja berbeda.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada perusahaan atau bank yang sama dan topik pembahasan yang sama, sebaiknya menggunakan aturan-aturan terbaru yang berlaku pada tahun tersebut.

### **Implikasi**

Masukan dari peneliti yang ditujukan untuk Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)



Bhakti Sumekar cabang Kalianget untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari sebelumnya sebagai berikut :

1. Untuk meningkatkan penanganan yang optimal sebaiknya disetiap kantor cabang terdapat *Customer Service* (CS). Untuk melakukan aktivitas penghimpunan dana pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Bhakti Sumekar cabang Kalianget terutama produk deposito mudharabah, harus mampu bersaing dengan bank lain dan memberikan kepercayaan kepada nasabah untuk meningkatkan loyalitas nasabah.
2. Dalam prosedur pembukaan deposito mudharabah untuk perorangan sebaiknya diminta surat pernyataan ahli waris untuk mencagah hal-hal diluar kemampuan bank sebagai pengelola dana, sehingga terdapat pihak ketiga yang dapat menerima hak bagian dari deponan.

#### DAFTAR RUJUKAN

- Buku Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar*. (2016). Diunduh tanggal 28 Juni 2019 dari <https://bhaktisumekar.co.id>.
- Buku Laporan Tahunan BPRS Bhakti Sumekar*. (2018). Diunduh tanggal 1 Juli 2019 dari <https://bhaktisumekar.co.id>.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Deposito Syariah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/VI/2000 tentang Kafalah.
- Karim, A. A. (2017). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi Kelima*. Depok: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2014). *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya : Edisi revisi 2014*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Salman, K. R. (2017). *Akuntansi Perbankan Syariah : Berbasis PSAK, Edisi Kedua*. Jakarta Barat: Penerbit Indeks.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 butir 2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Pasal 4 tentang Perbankan Syariah.